

Masyarakat Islam tradisional-paternalistik di Indonesia secara khusus Madura-Sumenep memahami Kiai sebagai pribadi yang memiliki kedudukan khusus. Realitas kekhususan adalah merupakan figur Kiai yang dikenal sebagai tokoh sentral yang dihormati dan ditaati terkait otoritasnya baik dalam bidang agama, etika dan fungsi spritualnya sebagai penjaga keharmonisan umat.⁴ Pandangan seorang Clifford Geertz⁵ menyebut sebagai makelar budaya (*cultural broker*) bahkan dalam penelitian Bustami disebut ‘orang serba bisa’ (*multiplayer*) karena peran dan fungsinya seorang kiai dapat menyelesaikan masalah.

Perbincangan para pengamat dan bahkan oleh Kiai sendiri menyangkut layak tidaknya seorang Kiai terjun dalam politik praktis dimana muara akhirnya adalah suatu kekusaan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Kiai seharusnya lebih baik berperan saja sebagai pengayom dalam kehidupan beragama dan lebih tepat menghindarkan diri dari dunia politik. Sebaliknya terdapat pendapat yang cenderung berbeda bahwa tidak ada alasan Kiai harus meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian dari agama itu sendiri.⁶ Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Ghazaly dalam karya monumental *ihya' ulumiddin*, bahwa agama dan kekusaan dua hal yang saling mendukung satu sama lain, agama tanpa kekusaan tidak bisa tegak, ibarat orang kedinginan yang butuh selimut, ibarat bangunan rumah yang butuh atap

⁴Muhammad Baharun, *Peran Kiai Sebagai Multi Prayer* dalam Pengantar Buku *Kiai Politik Politik Kiai* (Malang Pustaka Bayan, 2009), xii

⁵Seorang peneliti yang membagi Islam menjadi tiga tipologi (1) Islam Santri (2) Islam Priyayi dan (3) Islam Abangan, namun penelitiannya terbantah oleh peneliti selanjutnya.

⁶ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), 1.

2. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh elite pesantren dapat berafiliasi dengan yang punya kuasa (pemerintah). Afiliasi berupa relasi seperti yang terjadi di pesantren an-Nuqayah Guluk-Guluk daerah Lubangsa raya. Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka, Bluto. Pesantren Aqidah Usymuni Tarate Sumenep. Pesantren al-Aswaj Ambunten dan Pesantren al-Karimiyah Beraji Gapura.
3. Para santri dapat diarahkan pada sebuah organisasi atau partai politik atau bahkan calon tertentu. Keterjadian ini terjadi diberbagai pesantren yang punya relasi dengan partai politik sebagaimana tersebut di atas.
4. Penyampaian doktrin politik melalui pendidikan dan pembelajaran para elite pesantren kepada para santri. Kecenderungan ini muncul dengan diselipkan dalam pendidikan pesantren pada waktu interaksi pembelajaran yang dicoba dikorelasikan dengan ideologi politik tertentu.
5. Dakwah dalam organisasi kemasyarakatan sering menjadi sarana sosialisasi dengan argumentasi tidak langsung berupa selipan ucapan dalam kegiatan bersama masyarakat baik dalam organisasi formal atau organisasi non formal seperti mingguan atau bulanan.

Secara akademik dampak dari kecenderungan relasi elite pesantren seperti di atas dimaknai sebagai bagian dari transformasi sosial dan sarana eksistensi aktor dalam legitimasi kultural pada kelas sosial (*legitimate culture performs in class relations*) yang melingkupi eksistensi aktor

dalam realitas sosial.³⁰ Oleh karena itu dalam realitas sosial kekuasaan selalu mengalami proses mengubah, memperkokoh dan memutarbalikkannya,³¹ atau dalam perspektif Giddens, sebagai bagian dari *reproduction of locality* yakni suatu proses pendefinisian ulang ruang atau bahkan pembangunan ruang dengan tujuan untuk menjamin pelestarian dari kekuasaan kelompok yang memerintah.³²

Hal yang sering terjadi dalam dunia politik, orientasi kekuasaan sering menjadi segala-galanya dan menggunakan berbagai cara demi mencapai kekuasaan. Salah satunya menggunakan agama. Hal ini terjadi di Indonesia termasuk Sumenep mengingat Indonesia merupakan Negara plural, sehingga para elite pesantren yang dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan agama menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan dan memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan masyarakat.³³

Salah satu contoh yang terjadi di Sumenep terkait politik dan kebijakan pendidikan Islam. Seperti yang diungkapkan oleh praktisi pendidikan Moh. Ersyad ia selaku ketua Dewan Pendidikan Sumenep Bupati harus memilih Kepala Dinas (Kadis) yang berkualitas. Di mana yang terjadi di internal Dinas Pendidikan masih banyak proses dipilih dan terpilih tidak berdasarkan kompetensi atau jenjang karir namun hanya

³⁰Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of The Judgement of Taste* (New York: Routledge, 2006), 12

³¹Michael Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 121.

³²Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5.

³³Abuya Busyro Karim, *Indonesia & Globalisasi* (Yogyakarta: Raja Pilar Politika, 2005), 56-57.

Secara khusus melihat adanya kecenderungan yang muncul dari relasi elite pesantren dan kekuasaan menjadi kajian keilmuan yang lebih dinamis dengan memadukan, mempertentangkan teori serta mensintesa dengan mengambil kesimpulan dalam teori-teori sosial dengan paradigma berbasis ke-Islam-an sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pesantren dan politik dalam relasi elite pesantren tentang kebijakan berbagai kebijakan secara khusus kebijakan pendidikan pendidikan Islam.

Melihat ini semua tentunya harus ada seleksi dalam melihat fenomena elite pesantren dengan kebijakan pendidikan di Sumenep dengan menelaah secara komperhensif tentu dilakukan objektif berupa penelitian ilmiah dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai usaha melakukan kajian dari berbagai dimensi sehingga peneliti tertarik dan menentukan judul, “Pesantren dan Politik, Relasi Elit Pesantren dengan Kebijakan Pendidikan Islam di Sumenep”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian tentang pesantren dan politik: relasi elite pesantren dengan pemangku kebijakan di Kab. Sumenep ini menfokuskan pada relasi elit pesantren dengan pemangku kebijakan sebagai posisi sentral dan dapat melakukan implementasi kebijakan dengan konsep yang diimplementasi dan termanifestasikan demi kemajuan pendidikan. Hal ini penting karena sejak reformasi pada tahun 1998 banyak elite pesantren bertarung untuk merebut kursi legislatif ini terjadi sejak dilakunnya sistem

multi partai di awal reformasi. Selanjutnya pada tahun 2000 elite pesantren Sumenep maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Bupati), dimana hingga saat ini posisi sentral pemangku kebijakan di Sumenep dipegang oleh elite pesantren. Walaupun juga masih ada para elite pesantren yang tetap eksis di pesantren dan tidak aktif dalam politik praktis dan berbagai jabatan birokrasi.

Batasan masalah berusaha melihat relasi elite pesantren anggota legislaif dan pihak eksekutif tidak boleh dipahami dikromis, namun berjalan secara dealektis. Batasan ini penting dan tidak bisa dilepasakan dari proses politik dengan merepresenatsikan diri sebagai wakil rakyat dan pemangku kebijakan dalam struktur kekuasaan dalam manifestasi berupa kebijakan. Perjalanan elite pesantren dalam proses perjalan politik berada dalam arena sosio-kultural dan struktural. Hal ini adalah merupakan suatu penegasan pencairan ideologis dan politik identitas tentu tidak bisa dijelaskan dari proses politik yang termanifestasi dalam bentuk kebijakan bahwa demokrasi polotik pasca orde baru sangat dinamis.

C. Rumusan Masalah

Secara khusus penelitian ini ingin menjawab bagaimana pesantren dan politik pendidikan yang berkembang di Kabupaten Sumenep dalam berbagai pola relasi elite pesantren tentang pemangku kebijakan pendidikan secara umum dan kebijakan pendidikan Islam pesantren dan secara khusus lagi dalam hal ini dapat peneliti rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Hal ini sesuai dengan disiplin keilmuan peneliti dan berbagai matakuliah metodologi yang diajarkan dalam proses pembelajaran studi-studi ke-Islam-an. Oleh karena itu, diharapkan dengan mengetahui relasi elite pesantren dan politik dalam pola relasi elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan Islam khususnya daerah Sumenep, sehingga penelitian ini sebagai modal akan dapat dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan melakukan kritik ulang terhadap berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pesantren dan politik dalam pola relasi elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan Islam di daerah Sumenep dan Madura pada umumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan berbagai penemuan-penemuan baru atau minimal dapat mengembangkan penelitian sebelumnya dalam penelitian studi-studi ke-Islam-an dengan memadukan teori-teori politik dengan teori keilmuan lainnya, seperti teori kebijakan pendidikan, sosiologi pendidikan dan ilmu pendukung lainnya seperti manajemen pesantren dan birokrasi. Secara khusus diharapkan muncul disiplin keilmuan yang lebih dinamis dengan memadukan, mempertentangkan teori serta mengambil kesimpulan dalam teori-teori ke-Islam-an sehingga dapat menjawab berbagai macam persoalan sosial politik kemasyarakatan dan keagamaan yang terjadi, terutama berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pesantren dan politik pendidikan dalam mencari relasi elite pesantren tentang kebijakan pendidikan Sumenep.

3. Penelitian Disertasi oleh Ridlwan Nasir tentang “Dinamika Sistem Pendidikan Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur” pada tahun 1995 penelitian ini arah telaahnya adalah pada sistem pendidikan yang meliputi: model pendidikan pesantren, model pendidikan madrasah, model pendidikan Sekolah umum dengan membandingkan tiga model pendidikan tersebut mana yang lebih ideal dalam membentuk kepribadian santri. Penelitian ini menggunakan *multi-case study* di mana pada setiap lembaga pendidikan pada masing-masing pesantren ditelaah dinamikanya sebagai asas untuk dianalisis dengan satu kesimpulan.³⁷
4. Achmad Patoni, “Peran Kiai Pesantren dalam Pratai Politik” Disertasi Unmer, Malang 2007. Peran kiai dalam partai politik ada beberapa bentuk. Pertama, sebagai aktor politik seperti tim sukses, sekaligus juru kampanye pada partai tertentu. Kedua, sebagai pendukung. Pada peran ini kiai mendukung partai tertentu. Ketiga, partisipan. Pada peran kiai memberikan restu terhadap calon tertentu dan tidak terlibat aksi dukungan atau tim sukses. Kiai pesantren sebagai *agent of social control* menuju tegaknya *amar ma'ruf nahi mungkar* ketika terjun dalam suatu partai politik dan dukungan tertentu.³⁸
5. Penelitian oleh Ali Maschan Moesa “Nasionalisme Kiai; Konstruksi sosial berbasis agama” dimana pada tahun 1999 negara Indonesia diliputi semangat reformasi dimana nasionalisme kiai adalah pemahaman keterikatan (*al-ashabiyah*) oleh sekelompok orang dalam letak geografis

³⁷ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

³⁸ Achmad Patoni, “Peran Kiai Pesantren dalam Pratai Politik” Disertasi Unmer Malang 2007.

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura khususnya Sumenep. Namun, hal menarik dari penemuan Kuntowijoyo menyebut adanya pertautan dalam struktur masyarakat tegalan di Madura yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan. Meskipun jarang mengadakan pertemuan dalam konteks persoalan-persoalan ekologis, mereka mengadakan pertemuan wajib yang diikat dengan ketaatan akan urgennya ajaran agama (Islam).

Diskursus tentang peningkatan mutu dalam ranah pendidikan Islam merupakan tema selalu menarik, terutama ketika gelombang modernisasi pendidikan Islam telah berjalan dan mempengaruhi institusi-institusi pendidikan Islam, tak terkecuali pendidikan pesantren tradisional dan semi tradisional.

Masalah pelaksanaan pendidikan antara pesantren dan masyarakat Madura ini dari hal *juz'iyat* dapat dijumpai misalnya pada shalat Jum'at. Shalat yang dilakukan secara bersama-sama ini dengan syarat tidak boleh kurang dari empat puluh orang laki-laki dewasa menunjukkan adanya hubungan yang dilandasi oleh faktor keagamaan. Melalui pertautan inilah timbul tokoh dalam masyarakat yang berasal dari kelompok agamawan. Tokoh ini kemudian menjadi pemimpin bagi kelompok tersebut. Pemimpin yang berasal dari masyarakat ini dikenal dengan istilah Kiai.

Sedangkan penelitian tentang Pesantren dan politik; relasi elite Pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Sumenep berusaha menggali secara mendalam tentang bagaimana ketika elite pesantren

yakni relasi para elite pesantren dalam kontestasi konteks realitas sosial, pendidikan, dakwah dan bahkan politik yang menjadi fokus penelitian ini.

Alasan akademis ini membuat peneliti menelusuri kembali dalam berbagai kesempatan, akhirnya peneliti menemukan adanya tulisan berkaitan dengan eksistensi seperti tradisi keagamaan yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama, dengan basis pengajian dan aktivitas pendidikan *langghar* (semacam mushalla terbuat dari bambu) seperti di daerah Sema, Lambi Cabi, Tenggina, Bandungan, yang sampai penelitian ini berlangsung aktivitas pengajian dan pendidikan gaya *langghar* masih dilakukan oleh kiai pedesaan di Sumenep dan biasa terjadi para elite pesantren pesantren yang memiliki santri banyak biasanya punya nilai tawar yang diperhitungkan dalam berbagai hal termasuk dalam ranah politik.⁵⁵

Observasi penelitian disertasi ini menunjukkan para elite pesantren dan aktivitas sosial keagamaan yang melibatkan para elite pesantren tumbuh dengan subur, dimana para elite pesantren awalnya menjadi guru *langghar* dan terlibat dalam berbagai kompolan yang berlangsung secara bergiliran dari rumah ke rumah yang lain. Media ini membantu menemukan asumsi awal bagaimana proses terjadinya elitisasi pada para elit pesantren yang cenderung dihormati. Media ini akan membantu peneliti untuk melihat dan menganalisis para elite pesantren dalam realitas kancah perpolitikan dan kebijakan di Kabupaten Sumenep.

⁵⁵ Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos kerja, Penampilan dan Pandangan hidupnya seperti Dicitrakan Peribhasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), xi

pesantren, sehingga peristiwa yang awalnya tidak menjadi bagian utuh menjadi rangkaian kejadian yang mendukung data ketika peneliti melakukan interpretasi ulang terhadap analisis dan keadaan data maupun peristiwa.

Pencatatan dengan menggunakan *field-note* menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Setiap peristiwa ataupun kejadian dari cerita tentang elit pesantren, merupakan informasi berharga bagi data awal dalam membandingkan dan menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya. Data yang telah diperoleh tidak hanya didiamkan sebagai data final dalam penelitian, data tersebut senantiasa dilakukan reinterpretasi dengan melihat data lain dengan diklasifikasikan pada data-data penting lainnya. Reinterpretasi terhadap data sebelumnya menjadi bagian yang tidak pernah selesai dalam penelitian.

Data awal menunjukkan bahwa para elite pesantren sebagai agen sosial keagamaan memiliki jejaring kekerabatan yang kuat pada elit pesantren dan tokoh masyarakat di Sumenep karena keturunan langsung dari kiyai sebagai pemimpin pesantren yang seharusnya tidak hanya memiliki kemampuan pengetahuan keagamaan namun juga sebgaiian memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang cukup besar dan diperhitungkan dengan kekerabatan dan potensi politik tersebut, para elite pesantren memiliki otoritas dan motivasi untuk senantiasa menunjukkan dinamika dan eksistensi serta potensinya dalam melakukan gerakan-gerakan pembaharuan dan pemberdayaan terhadap masyarakat

Sumenep dengan kekerabatan yang kuat dan menyebar di berbagai pesantren kecil dan besar serta ditopang dengan ekonomi yang kuat pula memungkinkan para elite pesantren memperoleh legitimasi kultural dalam setiap fatwa keagamaan baik dalam mendulang kepercayaan politik dan melindungi dirinya dari kejahilan orang lain dengan dinamika yang lebih tinggi ataupun memiliki hubungan yang erat dengan institusi pesantren lain.

Meskipun dinamika tersebut dirasakan dalam gerak yang relatif kecil namun dipandang akan mengejutkan pada penelitian di masa yang akan datang, yang dirasakan sulit untuk menggali informasi dan data serta peristiwa dari kalangan para elite pesantren. Oleh karena itu, ketekunan dari peneliti dipandang penting untuk menguraikan dan menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi secara berkesinambungan yang terjadi pada para elite pesantren Sumenep.

5. Analisis Data Penelitian

Setelah melakukan observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) serta menelusuri dan membaca serta menganalisis buku-buku, telah berbagai dokumen dan hasil-hasil penelitian tentang para pesantren dan politik terakait dengan elite pesantren terhadap kebijakan pendidikan Islam seperti pesantren dan mdrasah, penelitian ini diarahkan untuk melakukan klasifikasi dan analisis data. Analisis data mempergunakan deskriptif-analisis dengan mengkombinasikan kembali data-data hasil interpretasi dan reinterpretasi serta mencocokkan dengan dokumentasi

perbedaan situasi dan konteks dengan para elite pesantren yang terjadi pada masyarakat secara umum, sehingga perbedaan ini memerlukan analisis yang lebih jauh dan mendalam berkaitan tidak saja dengan kultur masyarakat yang berbeda namun lebih spesifik kepada para elite pesantren Sumenep, meskipun realitas di lapangan memiliki perbedaan pemilihan kata-kata terutama berkenaan dengan dinamika namun memiliki substansi yang hampir sama.

Oleh karena itu, secara metodologis pada analisis *comparative-constant* peneliti dituntut untuk mencari konteks lain berkenaan dengan proses pengungkapan pemaknaan di balik realitas ataupun data sehingga dalam kapasitas dan kapabilitas peneliti dipandang cukup untuk memberikan konseptualisasi teori. Pada tahap ini pola pikir analisis data yang dipergunakan yakni pola pikir reflektif yaitu proses analisis antara empiris dengan abstrak. Dalam pada itu satu peristiwa dapat menstimulasikan berkembangnya abstrak yang lebih luas sehingga mampu memperlihatkan relevansi antara data yang satu dengan data yang lain yang termuat dalam data baru yang dibangun oleh peneliti dengan melihat data yang diperoleh dari lapangan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan setiap kemampuan indera melalui penglihatan, pengamatan dan pendengaran terhadap peristiwa ataupun informasi berkenaan dengan eksistensi para elite pesantren Sumenep

Model penelitian ini menggunakan analisis model interaktif atau skema dinamis. Model analisis ini memandang bahwa di dunia ini orang

berlangsung secara berabad-abad dan disaksikan dalam realitas kekinian oleh peneliti menjadi bahasan pada awal bab ini. Pesantren dan politik dan pola relasi elite pesantren Sumenep menjadi dasar pijakan awal dari pembacaan realitas para elite pesantren Sumenep pembahasan signifikansi dan problem dari studi lapangan ini menjadi bagian lanjutan. Tidak terkecuali peneliti menetapkan tujuan dan kerangka metodologis serta fokus pembahasan dan sistematika studi penelitian menjadi awal yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi penghantar awal bagi pelaksanaan penelitian disertasi ini.

Pada bab kedua dibahas kajian teoretik tentang yang meliputi kajian elit pesantren, interaksi politik Kiai, peran ganda Kiai, teori relasi dan konsep politik pendidikan Islam yang di dalamnya dibahas paradigma politik pendidikan, pendekatan politik pendidikan. Selanjutnya dibahas konsep kebijakan pendidikan yang didalamnya ada aktor-aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan. Selanjutnya juga dibahas implementasi kebijakan pendidikan, evaluasi kebijakan pendidikan dan tujuan evaluasi kebijakan pendidikan.

Pada bab ketiga akan dibahas latar belakang atau gambaran umum wilayah Kabupaten Sumenep yang berkenaan baik secara geografis administratif dan kondisi fisik, yang meliputi letak geografis, administratif, topografi, hidrologi, klimatologi dan demografi. Selanjutnya dibahas juga keuangan dan perekonomian daerah kabupaten Sumenep,

penataan umum kabupaten Sumenep, kondisi sosial budaya dan pendidikan yang meliputi kondisi fasilitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan pemerintah daerah. Selanjutnya dibahas ikhtiar penataan kebijakan pendidikan.

Pada bab keempat ini akan membahas relasi elit pesantren yang bahasannya meliputi relasi antara pendidikan dan politik, elit pesantren sebagai pemangku kebijakan yang kemudian dipaparkan tokoh elit pesantren yang menjadi Bupati yakni Kiai Ramdhan Siraj dan A. Busyro Karim sebagai pemangku kebijakan dan juga tokoh Kiai Safraji yang dilengkapi dengan profil pesantren keadaan sosiologis lingkungan dan kebijakan pendidikan pada saat menduduki posisi orang nomor satu sekaligus pemangku kebijakan dalam wilayah eksekutif.

Pada bab kelima dibahas Kebijakan pendidikan yang meliputi Perda dan Perbub Pendidikan, revisi tentang Perda dan Perbub pendidikan, menata sumber daya pendidikan yang meliputi; menata kualitas SDM dan peningkatan kesejahteraan pendidikan, peningkatan SDM pendidikan berkualitas serta bagaimana mengakhiri jabatan Kepala sekolah seumur hidup. Selanjutnya dibahas juga layanan pendidikan dari segi fasilitas dan kesejahteraan yang meliputi; peningkatan sarpras pendidikan; bantuan motor bagi para pengawas; BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Guru Swasta) dalam meningkatkan dan membela nasib guru swasta dan santri; bantuan transport guru swasta; bantuan GTT kategori 2 (K2) dan perang terhadap buta akasara. Selanjutnya dibahas

juga peningkatan kualitas pendidikan melalui pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang mencakup mendirikan PAUD dan TK dari Kota-Desa, membumikan SMK sebagai investasi *human capital*. Selanjutnya dibahas juga dibahas pengembangan pendidikan tinggi lokal untuk kemajuan Sumenep yang meliputi; pemberian bantuan dana pendampingan belajar mahasiswa masuk perguruan tinggi; besiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan memberdayakan organisasi kemahasiswaan melalui bantuan biaya pendidikan.

Bab keenam membahas respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep yang membahas respons masyarakat tentang kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep, kebijakan penda kabupaten Sumenep pada pendidikan pesantren, di dalamnya dibahas baik dari segi politik anggaran, politik kebijakan dan juga dibahas dari segi politik pembangunan.

Bab ketujuh penutup yang berisi berupa kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan berbagai implikasi teoretik berkaitan dengan para elit pesantren sebagai elite lokal Madura dan secara spesifik Sumenep dengan kebijakan pendidikan dalam perspektif politik pendidikan.